



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

No : 004/SK/FH/UNHI/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL PRODI HUKUM ADAT, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR 2019 - 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa rencana strategis dan rencana operasional disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud RI. No. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD menjadi UNHI;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56/ Tahun 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Srata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu;
6. Surat Keputusan BAN PT No. 2567/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 tentang Akreditasi Program Studi Hukum Agama Hindu, Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
7. Surat Keputusan BAN PT No. 3276/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tentang Akreditasi Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Pembukaan Program Studi Hukum Adat pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Menyatakan berlakunya rencana strategis dan rencana operasional Prodi Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar tahun 2019 - 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
Kedua : Menugaskan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Prodi Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar untuk mensosialisasikan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana operasional ini di lingkup kerja masing-masing;
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 15 Januari 2019

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum
NIP. 195608201983031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UNHI
2. Yang bersangkutan
3. Arasp

**RENCANA
STRATEGIS DAN
OPERASIONAL
TAHUN 2019-2023**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DENPASAR
2019**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia dapat selesai tepat pada waktunya. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia ini disusun sebagai dasar pijakan atau pedoman bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlangsung di Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia untuk melakukan penentuan arah kebijakan, strategi dan pengembangan yang perlu dilakukan. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia selama 5 (lima) tahun. Selain itu, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia berisi tentang deskripsi indikator-indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk program kerja Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Tahun 2019-2023. Sebagai penutup semoga Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia dapat dijalankan secara efektif, efisien dan optimal.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

Denpasar, 15 Januari 2019

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum

NIP. 195608201983031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	3
BAB III ANALISIS SITUASI.....	7
BAB IV RENCANA STRATEGIS.....	10
BAB V RENCANA OPERASIONAL.....	12
BAB VI PENUTUP.....	17

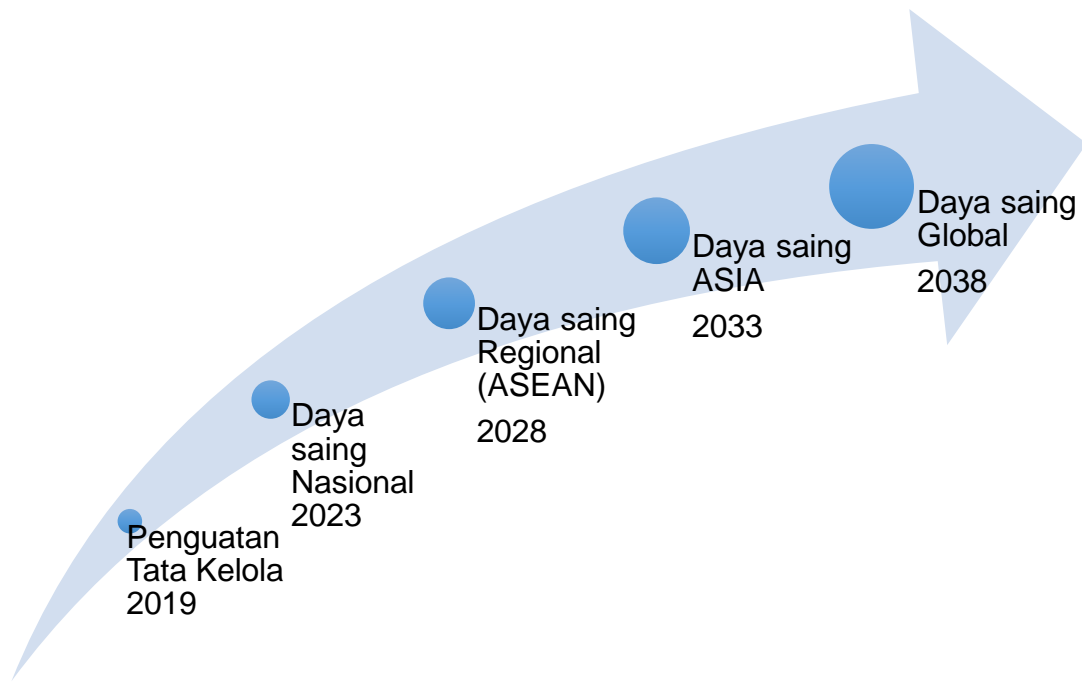
BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia mengacu dan berlandaskan pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Universitas Hindu Indonesia. Selain melaksanakan kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan *tri dharma* Perguruan Tinggi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia juga mengemban tugas untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Bali yang bernafaskan ajaran Agama Hindu.

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mencapai tujuan tersebut Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia senantiasa memperhatikan kondisi internal terhadap potensi yang ada dan yang sedang berkembang serta kondisi eksternal seperti keadaan lingkungan, perkembangan peraturan dan kebutuhan stakeholder terkait. Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis dengan mengkaji faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan untuk selanjutnya disusun strategi penguatan, pengembangan dan langkah-langkah perbaikan.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang disertai dengan peningkatan relevansinya menghadapi persaingan nasional dan global. Untuk mewujudkan visi menjadi Program Studi unggulan di Indonesia Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia telah menyusun program jangka waktu lima tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia (Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI) 2019-2023. Di tahun 2023 Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI diharapkan telah memiliki daya saing nasional, sehingga sumber daya manusia, tata kelola, sarana dan prasarana maupun *mindset* sivitas akademika harus ditingkatkan dan berorientasi pada mutu.



Gambar 1.1 Tonggak Capaian Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI 2023-2038

Renstra- Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI tahun 2019-2023 disusun berdasarkan kepada (1) Penyelarasan Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, (3) Rencana Strategis Unhi 2019-2023, (4) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Unhi saat ini, dan Program Kerja Rektor 2019-2022.

Dalam penyusunan Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI 2019-2023 mengangkat empat isu utama yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan reputasi Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI, (2) Peningkatan relevansi dan daya saing Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI, (3) Peningkatan akses pendidikan di Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI, dan (4) Peningkatan tata kelola Unhi. Setiap program yang terkait dengan isu utama tersebut kemudian ditetapkan indikator kinerja program yang secara terukur ditargetkan setiap tahunnya. Renstra-Renstra-Prodi Hukum Adat FH UNHI 2019-2023 dijabarkan menjadi program dan kegiatan dalam Program Kerja Tahunan Prodi Hukum Adat FH UNHI.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Program Studi Hukum Adat Universitas Hindu Indonesia berdiri pada tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 2 Tahun 2019 dan sudah melakukan kegiatan pendidikan sejak bulan September 2019. Program Studi Hukum Adat ini juga merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka Program Studi Hukum Adat didirikan berdasarkan spirit untuk memajukan sumber daya manusia dalam pendidikan hukum adat dan para prajuru adat di Bali dalam menghadapi kebijakan administrasi negara yang semakin modern pada khususnya, diharapkan Program Studi Hukum Adat dapat menjadi tonggak utama pelestarian dan penguatan Hukum Adat di Bali sesuai dengan semangat menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Hukum Adat telah sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan dan berlaku di tingkat Universitas Hindu Indonesia. Adapun **Visi** dari Universitas Hindu Indonesia, yakni:

“Menjadi Universitas Unggulan di Indonesia serta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Agama dan Budaya Hindu Indonesia Terbaik di Kawasan Regional.

Universitas Hindu Indonesia untuk mencapai visi tersebut kemudian menjabarkan **Misi** Universitas, antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kompetensi yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menganut nilai-nilai ke Hinduan.
2. Menerapkan manajemen universitas dengan mengacu pada standar akreditasi nasional.
3. Mengkaji dan mengembangkan agama dan budaya Hindu Indonesia melalui pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis TIK.
4. Membangun citra UNHI sebagai institusi pendidikan tinggi serta pusat pengkajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia.

Selanjutnya, **tujuan** Universitas Hindu Indonesia, antara lain:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan religius yang memiliki keunggulan serta daya saing berdasarkan *srada* dan

2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi

Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Tujuan di tingkat Universitas Hindu Indonesia, kemudian diturunkan ke Visi, Misi, Strategi dan Tujuan pada Program Studi Hukum Adat. Adapun **Visi** dari Program Studi Hukum Adat, yakni:

“Menjadi Program Studi Unggulan serta Pusat Kajian dan Pengembangan Hukum Adat di Indonesia yang Bernafaskan Agama Hindu dan Kearifan Lokal Budaya Bali”

Program studi Hukum Adat untuk mencapai visi tersebut kemudian menjabarkan **Misi** dari Program Studi Hukum Adat yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Hukum berbasis kompetensi hukum adat yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menganut nilai-nilai Agama Hindu dan Kearifan Lokal Bali.
2. Menerapkan manajemen program studi dengan mengacu pada standar akreditasi nasional
3. Mengkaji dan mengembangkan Hukum Adat Bali melalui pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Membangun citra program studi sebagai lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengkajian dan pengembangan Hukum Adat Bali yang bernafaskan Agama Hindu dan Kearifan Lokal Bali

Selanjutnya sebagai **tujuan** dari Program Studi Hukum Adat yaitu :

1. Menghasilkan lulusan yang religius, inovatif, dan berintegritas yang memiliki keunggulan serta daya saing dalam bidang hukum adat Bali berlandaskan *sradha* dan *bhakti*;
2. Meningkatkan kapasitas program studi dalam memberikan akses pelayanan dalam bidang pendidikan kepada masyarakat;
3. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang terkait hukum adat untuk meningkatkan mutu *tri dharma* perguruan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan mutu maka dengan ini dijabarkan **sasaran** dan **strategi** yang akan diterapkan oleh Program Studi Hukum Adat Universitas Hindu Indonesia:

SASARAN	STRATEGI
Pembentukan dan pengembangan jati diri Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan pengembangan jati diri sebagai pusat pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat yang berbasis kebudayaan dan nasional; 2. Peningkatan kompetensi dan keahlian profesional dibidang hukum; 3. Memperkokoh jati diri dan profil program studi hukum adat dalam wilayah lokal, nasional maupun internasional;
Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya dosen dan tenaga pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas <i>manpower</i> dalam tata kelola Program studi dalam ruang akademik, administrasi maupun sosial; 2. Penambahan kuantitas tenaga pengajar, pemerataan kemampuan dan pengetahuan tenaga pengajar; 3. Meningkatkan kemampuan tenaga pendukung dalam bidang sistem informasi manajemen untuk pengembangan bahan pembelajaran.
Pengembangan kualitas dan fungsi kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan perkuliahan sehingga selalu sejalan dengan kurikulum dalam koridor visi dan misi; 2. Mengembangkan kerangka dan isi kurikulum secara mendalam sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman. 3. Meningkatkan relevansi dan integrasi kurikulum sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Pengembangan pengelolaan efektivitas pembelajaran dan suasana akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfungsikan serta memaksimalkan alat dan media sistem informasi untuk tata kerja administrasi serta kegiatan perkuliahan; 2. Peningkatan dana yang diperlukan untuk kegiatan penelitian, pengabdian, diskusi, <i>workshop</i> dan seminar dalam rangka

	<p>peningkatan kualitas ilmu dan kemanfaatan yang diperoleh;</p> <p>3. Pemeliharaan dan modernisasi sarana dan prasarana perkuliahan untuk menjamin terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman;</p>
Pengembangan sistem penjaminan mutu	<p>1. Bekerjasama dengan badan penjamin mutu Universitas maupun diluar Universitas;</p> <p>2. Melaksanakan audit mutu internal secara periodik diadakan setiap tahun.</p>

BAB III

ANALISIS SITUASI

Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi dan menjadi dasar untuk mengembangkan alternative solusi dan program pengembangan.

Ketepatan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam keterkaitannya dengan capaian kinerja unit pengelola program studi hukum adat dengan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*) sebagai berikut.

Strengths yaitu

- Dukungan Infrastruktur Pendidikan yang memadai dalam proses belajar mengajar;
- Satu satunya Program Studi di Bali yang memiliki fokus kajian hukum adat;
- Dukungan dari stakeholder (Majelis Desa Adat dan Desa Adat), pemerintah daerah;
- Kualifikasi Pendidik yang memiliki kompetensi S2 dan S3;
- Keterlibatan praktisi adat dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian;

Opportunities yaitu:

- Meningkatnya peran adat dalam penyelesaian sengketa, sehingga daya tarik prodi mengalami peningkatan;
- Sebagai praktisi adat dan hukum adat yang memiliki kualifikasi akademik;
- Mediator penyelesaian sengketa adat pada tingkat lokal maupun nasional;
- Peneliti bidang hukum adat;

Weakness yaitu:

- Sosialisasi Program Studi belum dilakukan secara optimal;

- Minimnya kompilasi hukum adat sebagai sumber referensi utama;
- Belum memiliki alumni, sehingga representasi kompetensi lulusan belum dapat diprediksi;
- Sumber dana untuk terwujudnya visi dan misi belum memadai;

Threat yaitu:

- Persaingan dengan prodi ilmu hukum umum pada perguruan tinggi lain;
- Kelangkaan formasi bagi dosen khusus bidang hukum adat;

3. Strategi pengembangan

Kemampuan Unit Pengelola Program Studi Hukum Adat dalam menetapkan strategi dan program pengembangan dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis lima tahun ke depan. Penentuan rencana strategis dengan memperhatikan skala prioritas pengembangan Program Studi Hukum Adat yang dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan. Pengembangan Program Studi Hukum Adat dengan merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Unit Pengelola Program Studi Hukum Adat dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan kapasitas dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, sebagai satu-satunya Program Studi di Provinsi Bali yang memiliki fokus kajian Hukum Adat dengan dukungan dari stakeholder seperti lembaga adat dan Kedamaian dan pemerintah daerah. Termasuk keterlibatan praktisi adat dalam kegiatan proses pembelajaran.

4. Program Keberlanjutan

Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan *good practices* yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Program keberlanjutan diperlukan dengan cara menyusun Rencana Strategi setiap lima tahun sekali, untuk menentukan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan unit pengelola program studi hukum adat dengan penyediaan sumber daya manusia tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidikan dengan program Doktor sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan hukum adat. Dengan kualifikasi dan keahlian dalam bidang ilmu hukum sangat mendukung dalam proses pembelajaran dan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Program Studi Hukum Adat, dengan mencetak Sarjana yang ahli hukum adat dan menjadi praktisi dalam bidang ilmu hukum. Rencana strategi dan program keberlanjutan dapat tercapai dengan mengandalkan penjaminan mutu dengan memperhatikan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan cetakan lulusan yang sesuai dengan profil kelulusan yang sudah disusun dalam kurikulum berbasis KKNI.

Sistem penjaminan mutu Program Studi Hukum Adat dilakukan oleh Kepala Pusat Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia. Penjaminan mutu sebagai upaya yang ditempuh untuk mencapai hasil yang berkualitas, baik secara internal dan eksternal yaitu tercapainya kualitas pendidikan, kualitas pengajaran, kualitas penelitian, kualitas pengabdian masyarakat serta kualitas hasil yang dikelola pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

Untuk terwujudnya visi serta terlaksananya misi Program Studi Hukum Adat, FH UNHI, maka dalam rencana strategis Program Studi Hukum Adat, FH UNHI 5 (lima) tahun ke depan (2019-2023) ditetapkan empat arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan reputasi Program Studi Hukum Adat, FH UNHI
2. Meningkatkan relevansi dan daya saing Program Studi Hukum Adat, FH UNHI
3. Meningkatkan akses pendidikan di Program Studi Hukum Adat, FH UNHI
4. Meningkatkan tata kelola Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

Upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Program Studi Hukum Adat, FH UNHI, dalam rencana strategi Program Studi Hukum Adat, FH UNHI 2019-2023 secara substansial dirumuskan stragi pada masing masing kebijakan.

A. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Reputasi Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

Strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan reputasi Program Studi Hukum Adat, FH UNHI diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan status akreditasi program studi
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Meningkatkan eksposur karya ilmiah pada media masa
5. Melakukan aktivitas citra Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

B. Strategi Meningkatkan Relevansi dan Daya Saing Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

Strategi kebijakan untuk meningkatkan relevansi dan daya saing Program Studi Hukum Adat, FH UNHI diarahkan untuk:

1. Mengembangkan program studi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar
2. Penyesuaian dan redesign kurikulum

3. Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan
4. Perlindungan terhadap Program Studi Hukum Adat, FH UNHI sebagai program studi penciri Unhi
5. Pengembangan IPTEK

C. Strategi Meningkatkan Akses Pendidikan di Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

1. Peningkatan daya tampung mahasiswa
2. Peningkatan sumber pendanaan beasiswa
3. Penyediaan biaya operasional yang bersumber dari dana non spp

D. Strategi Meningkatkan Tata Kelola Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

1. Pengembangan sistem informasi manajemen akademik, sumber daya manusia dan keuangan
2. Pengembangan skema pendanaan yang inovatif melalui kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan luar negeri
3. Pengembangan pusat unggulan di Program Studi Hukum Adat, FH UNHI

BAB V

RENCANA OPERASIONAL

Rencana operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia sebagai pendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Adat dijabarkan menjadi beberapa bidang, antara lain: bidang sumber daya manusia; bidang kelembagaan, bidang kemahasiswaan; bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penjabarannya sebagai berikut:

A. Bidang Sumber Daya Manusia

Program kerja prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka Peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan proporsi dosen dengan jabatan profesor dan lektor kepala serta dosen berkualifikasi doktor.
2. Pemberdayaan dosen purna tugas yang masih potensial pada program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015.
3. Mendatangkan dosen tamu melalui kerja sama penelitian, jejaring *visiting professor, guest lecture, invited speaker, international consultant* Serta *keynote speaker*.
4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi SDM, serta pelaksanaannya secara rutin menggunakan instrumen dan standar yang hasilnya ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas dan kompetensi.
5. Penyusunan analisis jabatan secara komprehensif untuk mengurangi proporsi dosen yang menjabat struktural.

B. Bidang Kelembagaan

Program kerja prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas bidang kelembagaan adalah sebagai berikut

1. Penataan dan penyesuaian aturan kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja UNHI dan Statuta UNHI);
2. Pembentukan lembaga pengawasan manajemen internal untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good University*

Governance; (transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, *fairness*, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi serta nirlaba);

3. Pengembangan skema pendanaan yang inovatif melalui kerja sama dengan pemerintah dan industri, komersialisasi hasil penelitian, pemanfaatan aset serta pembentukan badan usaha sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan mahasiswa dari kalangan masyarakat miskin serta kesejahteraan dosen dan pegawai.
4. Penguatan sistem data terintegrasi untuk kepentingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) serta Pangkalan Data Dikti (PD-Dikti);
5. Penyempurnaan sistem perencanaan dan pengelolaan dana, sarana prasarana, serta aset secara terintegrasi sehingga dimungkinkan adanya penggunaan sumber daya bersama (*resource sharing*).

C. Bidang Kemahasiswaan

Program kerja prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas bidang kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tampung melalui sosialisasi dan promosi, kerja sama dengan instansi pendidikan dan pemerintah di seluruh Indonesia serta promosi ke luar negeri untuk meningkatkan mahasiswa asing.
2. Penguatan sistem input
3. Pembangunan asrama untuk menampung mahasiswa satu angkatan pertama melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya;
4. Pengadaan peralatan laboratorium, dan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan program studi secara reguler;
5. Memperbanyak fasilitas untuk difabel;
6. Peningkatan sumber pendanaan beasiswa dari mitra
7. Peningkatan sumber pendanaan yang bersumber dari non SPP

D. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program kerja prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka Peningkatan kapasitas Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan publikasi bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan kebijakan kementerian untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional.

2. Peningkatan hilirisasi hasil penelitian melalui keterlibatan pemerintah dan swasta sejak awal penyusunan agenda riset di universitas sehingga hasil risetnya sesuai dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. Peningkatan akses referensi melalui langganan *database e-journal* yang berkualitas secara terintegrasi.
4. Menerbitkan jurnal ilmiah yang dikelola di program studi yang memenuhi persyaratan menjadi jurnal internasional sehingga terindeks pada lembaga pengindeks internasional bereputasi.
5. Penguatan kualitas pengelolaan penelitian di tingkat program studi yang sesuai dengan riset unggulan program studi.
6. Peningkatan kolaborasi penelitian dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik serta publikasi bersama pada jurnal internasional
7. Pembinaan publikasi internasional melalui pelatihan dan pendampingan publikasi secara terstruktur.
8. Pembentukan Pusat Unggulan Iptek (PUI).

Adapun indikator kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Bidang Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Program Studi Hukum Adat sebagai pendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Adat penjabarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Aspek Sumber Daya Manusia

NO.	URAIAN	TAHUN		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Dosen Berkuakifikasi S3 (Doktor)	44,4%	44,4%	55,5%	60%	65%
2	Dosen Bersertifikat Pendidik	4	5	5	7	9
3	Dosen dengan Jabatan Guru Besar (Profesor)	1	1	1	1	2
4	Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	0	0	2	4	9
5	Dosen dengan Jabatan Lektor	4	4	5	7	9

6	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	9 : 10	9 : 10	14 : 15	16 : 17	18 : 20
7	Tenaga Kependidikan	4	4	5	6	7

B. Bidang Kelembagaan

Terkait dengan aspek kelembagaan, indikator yang digunakan antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk menunjang tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Adat:

Tabel 2
Aspek Kelembagaan

NO	URAIAN	TAHUN		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peringkat Perguruan Tinggi Skala Nasional (Versi Webometrics)	432	432	400	350	325
2	Akreditasi Perguruan Tinggi	B	B	B	B	Unggul
3	Akreditasi Prodi Hukum Adat	Belum Terakreditasi	Terakreditasi Baik	Terakreditasi Baik	Terakreditasi Baik	Terakreditasi Baik Sekali
4	Program Study Terakreditasi Internasional	-	-	-	-	1
5	Jumlah Kerjasama Prodi Hukum Adat	11	17	23	25	30
6	Jumlah Pusat Unggulan Program Studi	1	2	3	4	5
7	Jumlah Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa	1 : 1,2	1 : 7,5	1 : 8	1 : 10	1 : 15

C. Bidang Kemahasiswaan

Terkait dengan aspek kemahasiswaan, indikator yang digunakan antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk menunjang tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Adat:

Tabel 3
Aspek Kemahasiswaan

NO.	URAIAN	TAHUN		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	1	1	2	2	8
2	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	-	-	-	-	11

3	Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja	-	-	-	-	11
4	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	-	2	2	3	3
5	Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Adat	11	68	118	168	218
6	Jumlah Mahasiswa Asing	-	-	-	-	-
7	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	11	68	100	120	150

D. Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Terkait dengan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, indikator yang digunakan antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk menunjang tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Adat:

Tabel 4
Aspek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO.	URAIAN	TAHUN		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Publikasi Internasional	9	2	15	18	20
2	Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan (Hak Cipta)	-	2	3	5	6
3	Jumlah Prototipe R&D	-	-	-	-	-
4	Jumlah Prototipe Industri	-	-	-	-	-
5	Jumlah Publikasi Nasional	9	8	20	25	30
6	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	3	3	4	5	6
7	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	18	12	24	27	32

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia (2019-2023) ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas universitas akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi *Tridharma* Perguruan Tinggi. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh keluarga besar Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia 2019-2023.

Dengan komitmen dan tanggung jawab yang telah tunjukkan oleh seluruh sivitas akademika selama ini serta keterbukaan menerima masukan dari semua pihak semoga dapat memperbaiki kinerja di masa mendatang.